

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan Gerakan Mahasiswa di Indonesia selalu menarik karena tidak dapat dilepaskan dengan sejarah perkembangan negara Indonesia. Gerakan mahasiswa telah menjadi fenomena penting dalam perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Bahkan, keberadaan Gerakan Mahasiswa selalu berpengaruh pada situasi politik nasional. Turunnya Soekarno menjadi Presiden pada tahun 1966 serta digantikannya Soeharto sebagai Presiden pada tahun 1998 adalah bukti besarnya pengaruh gerakan mahasiswa dalam perubahan politik di Indonesia (Nugraha, 2009: 1). Bahkan gerakan mahasiswa hadir jauh sebelum jaman kemerdekaan.

Pada tahun 1945 anak-anak muda dalam usia 20-an bahkan belasan tahun, menantang Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia, bagi mereka tidak perlu menunggu pernyataan dari Kerajaan Jepang karena pemerintah Jepang sudah kalah dalam perang dunia II, inilah semangat anak muda yang bergelora berbeda dengan semangat tua yang terlalu memikirkan segala sesuatunya.

Pada tahun 1966, Soeharto mempergunakan aksi anak-anak muda untuk memaksa Bung Karno turun dari jabatan dan membubarkan PKI, demonstrasi terjadi dimana-mana terutama di wilayah daerah khusus ibukota Jakarta sampai timbul bakar membakar, sehingga gugurlah anak muda yang bernama Arif

Rahman Hakim, yang melahirkan puisi jaket kuning berlumur darah, karena yang bersangkutan berasal dari universitas Indonesia dan tentara berlingung dibelakang kekuatan anak muda.

Pada tahun 1998 gelombang kerusuhan malahan berusaha menjatuhkan Pak Harto yang dirasakan sudah terlalu lama berkuasa selama 32 tahun. Di tambah dengan dugaan korupsi ratusan triliun sehingga istilah *power tends to corrupt* yang berarti kekuasaan cenderung untuk korupsi, menjadi sangat tepat. Pak Harto tidak kuasa melawan gelombang anak-anak muda ini yang menutupi gedung MPR berarak menuju istana Negara .dan di Jembatan Semanggi gugurlah Elang Mulia Lesmana.

Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari *social movement* atau gerakan sosial. Menurut Maran (2007: 70) bahwa suatu gerakan sosial adalah suatu upaya yang kurang lebih keras dan terorganisir di kalangan orang-orang yang relatif besar jumlahnya, entah untuk menimbulkan perubahan ataupun untuk menentang perubahan. Gerakan sosial terjadi karena adanya sekelompok orang yang ingin menciptakan perubahan maupun menolak perubahan. Mahasiswa merupakan suatu kelompok kritis yang prihatin terhadap keadaan negara dan masyarakat miskin. Mereka berani tampil, meski waspada tetapi tidak kenal rasa takut demi menuju perubahan yang telah diimpi-impikan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, mereka sering melakukan aksi protes dan demo untuk mendapatkan respon dari pemerintah.

Diskusi mengenai Gerakan Mahasiswa di Indonesia penuh dengan dinamika, karena selalu mengalami perubahan karakter dan bentuk pada

setiap jamannya. Soewarsono (1999: 1) menyebut bahwa sejarah awal Indonesia modern tentang Gerakan Mahasiswa memiliki empat "tonggak", yaitu "angkatan 1908", "angkatan 1928", "angkatan 1945" dan "angkatan 1966". Selanjutnya, Soewarsono menyebut bahwa keempat angkatan tersebut adalah generasi-generasi dalam sebuah "keluarga", Selain keempat angkatan tersebut, terdapat satu angkatan generasi lagi yang paling baru dan sangat berpengaruh tidak hanya pergantian politik kekuasaan saja, tetapi juga pada proses demokrasi di Indonesia, yaitu "angkatan 1998".

Setelah angkatan 1998, gerakan mahasiswa yang terjadi hingga saat ini adalah gerakan parsial dan sektoral yaitu dalam rangka untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan suatu rezim yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan bernegara. Kebijakan-kebijakan diberbagai bidang yang tidak berpihak pada rakyat, atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap dapat membahayakan keutuhan negara serta kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat seperti isu kenaikan BBM, isu pertambangan, isu politik serta isu lainnya.

Namun gerakan mahasiswa saat ini disinyalir banyak pihak mengalami degradasi atau kehilangan kekritisannya. Perlu dipahami bahwa kondisi saat ini telah terjadi perubahan makna kritis di mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa insan yang kritis adalah mereka yang asal menolak kebijakan pemerintah tanpa adanya kajian terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan image mahasiswa menjadi buruk di hadapan pemerintah maupun masyarakat. Mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada

pemerintah, terkadang tidak mengindahkan aturan dan norma yang berlaku. Padahal di negara ini, terdapat mekanisme penyampaian gagasan dan aspirasi kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sikap pragmatis yang terus menerus menghinggapi perilaku mahasiswa masa kini juga terbukti bagaimana mahasiswa dalam hal ini belum bisa meletakkan posisinya pada hal yang ideal. Maka sebenarnya bagaimana kehidupan dan aktifitas apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh para mahasiswa sehingga mahasiswa kembali kepada jalur dan koridor yang ideal sesuai dengan tugas dan fungsi serta peranannya mengingat mahasiswa adalah insan akademis yang merupakan abdi masyarakat dan negara

Pemerintahan yang saat ini berkuasa adalah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan ini dihasilkan dari pemilu Presiden tahun 2014 yang lalu. Joko Widodo terpilih secara demokratis menjadi Presiden setelah mengalahkan Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden. Kebijakan pemerintah Jokowi seringkali tidak dapat memuaskan berbagai pihak dan seringkali menyebabkan kontroversi dan akibat yang kurang baik bagi seluruh rakyat maupun sebagian masyarakat (miskin). Sejak kekuasaannya dijalankan, gerakan mahasiswa dalam demonstrasi terhadap kebijakan presiden Joko Widodo sering dilaksanakan walaupun dalam ukuran yang relatif kecil, sektoral dan per wilayah. Isu-isu yang disampaikan beragam, isu BBM, subsidi, kenaikan harga, kenaikan listrik, kenaikan pajak, janji waktu kampanye dan isu kabinet, isu gubernur dan lain-lain. Sejak awal pemerintahan, 100 hari pemerintahan, 1 tahun pemerintahan, 2 tahun pemerintahan ditandai dengan

aksi-aksi demokrasi mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain, seperti buruh, petani atau nelayan.

Mahasiswa termasuk kalangan yang sering melakukan demonstrasi mengkritisi kebijakan pemerintahan yang ada. Keterlibatannya dalam dunia politik untuk memastikan pemerintahan yang berjalan sesuai jalur perundangan dan berpihak kepada rakyat. Terdapat empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai cakrawala pemikiran yang luas diantara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah sampai universitas, sehingga mahasiswa telah mengalami proses sosial politik yang panjang diantara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik dikalangan mahasiswa. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian, dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elite dalam kalangan angkatan muda (Sanit, 2007: 78-81).

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) seringkali terlibat dalam aksi mahasiswa untuk mengkritik kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan. Aksi demonstrasi baik dilakukan sebagai bagian anggota BEM se Indonesia maupun BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara mandiri. Beberapa demo yang disuarakan diantaranya adalah demo tanggal 4 November 2016, mahasiswa terlibat bersama beberapa gelintir tokoh ulama dan

partai politik yang menggiring Presiden Jokowi untuk ikut bertanggung jawab karena membela mantan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok).

Kemudian demo tanggal 10 Januari 2017, BEM KM UMY bersama Forum BEM DIY dalam Seruan Aksi "AKSI BELA RAKYAT 10/01". Mahasiswa Yogyakarta Menggugat Rezim Joko Widodo dengan tuntutan: 1) Cabut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; 2) Tolak kenaikan harga BBM Non Subsidi yang dapat memicu kenaikan harga bahan pokok; 3) Naikan upah buruh dan cabut PP Nomor 78 Tahun 2015; 4) Kembalikan Pendidikan di Indonesia kembali ke Amanat UUD 1945 Pasal 31; Pemerintah harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di negeri ini dan hentikan sikap lempar tanggung jawab antar instansi negara.

Kampus memang mimbar bebas yang mengawali seorang mahasiswa mengenal kehidupan politik, kendatipun yang bersangkutan bukan jurusan politik, berita di koran yang memelas terasa dengan gampang akan mereka perjuangkan dalam sekejap sehingga dengan begitu mereka terasa menjadi pahlawan. Semangat mahasiswa ini ditambah oleh fisik mereka yang masih mantap muda dan tegap serta terampil, selama ini mereka mendengar masyarakat membutuhkan mereka, terutama di kota perkampusan mahasiswa menang menjadi sorotan umum baik formal maupun tidak formal, mereka disebut aktivis.

Aksi-aksi mahasiswa dalam demonstrasi saat ini lebih kepada menyampaikan kritik kebijakan pemerintah, bukan untuk tujuan melengserkan

rezim, termasuk yang dilakukan mahasiswa UMY tersebut di atas. Kritik-kritik tersebut terkait dengan penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Isu-isu apa yang menjadi perhatian dan kritik mahasiswa serta apa yang melatarbelakangi isu tersebut hingga layak dikritisi. Lebih jauh lagi bagaimana strategi disampaikan agar dapat didengar penguasa serta bagaimana kontribusi gerakan mahasiswa terhadap konstruksi sosial masyarakat.

Pergerakan mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi merupakan hal aktual dan menjadi perhatian seluruh masyarakat yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini karena menyajikan aktualitas, kesesuaian dengan bidang kajian Ilmu Pemerintahan yang mempelajari hubungan antara penguasa dengan rakyatnya yang dapat dilihat dari peristiwa pemerintahan dan gejala pemerintahan. Penelitian dilakukan pada era presiden Jokowi karena aktualitasnya (rezim yang sedang berkuasa) dan karena sering melakukan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Bagi sebagian kalangan kebijakan Jokowi sering dinilai “nyleneh”, kurang perhitungan sampai dinilai ngawur. Bagi kalangan mahasiswa sendiri sebagian kebijakan Jokowi lebih dilihat menguntungkan perusahaan, investor dan para kaum kapitalis serta kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Sehingga tema ini menjadi isu demo mahasiswa yang seksi dan tema kritik yang kuat. Di samping itu pemerintahan Jokowi menarik di teliti karena pada awal pemerintahannya, Jokowi dianggap kandidat yang masih kurang pengalaman, bukan dari militer, serta banyak diragukan kemampuannya oleh banyak pihak. Terkait masalah dan fenomena tersebut,

maka judul skripsi ini adalah **“Pergerakan Mahasiswa Mengkritisi Kebijakan Pemerintahan Jokowi (Studi Kasus Badan Eksekutif Mahasiswa Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016-2017).**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis merumuskan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apa saja isu-isu yang menjadi kritik pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMY terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo?
2. Bagaimana strategi pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMY dalam menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo?
3. Bagaimana kontribusi pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMY tersebut terhadap kontruksi sosial yang terbentuk ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isu-isu yang menjadi kritik pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMY terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
2. Untuk mengetahui strategi pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMY dalam menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

3. Untuk mengetahui kontribusi pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMY tersebut terhadap konstruksi sosial yang terbentuk.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMY dalam melakukan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan, informasi, wacana serta bahan evaluasi bagi mahasiswa pelaku pergerakan mahasiswa di UMY di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang gerakan sosial, gerakan mahasiswa serta bagaimana menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan. Bagi peneliti dapat menerapkan teori yang didapat dibangku kuliah dalam kenyataan yang ada. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Literatur Review

Penelitian tentang gerakan mahasiswa di Indonesia telah banyak dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu dan dalam berbagai universitas. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang gerakan mahasiswa dengan pendekatan ilmu sosial dan politik dapat dilihat pada penelitian-penelitian yang akan dibahas dalam sub-bab ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Zulfa (2014) yang berjudul “*Dinamika Relasi Organisasi Kolateral Independen dan Partai Politik: Relasi Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*”. Penelitian ini merujuk pada kasus Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) yang memutuskan untuk dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan, studi ini menelaah kerentanan organisasi kepemudaan yang memilih pola relasi *independent collateral organization*. Dengan sedikit pemicu perbedaan kepentingan, GMII tak sanggup mengelola konflik dengan PPP sehingga relasi sebagai organisasi kolateral partai bubar. Hasil dari penelitian ini adalah GMII tidak lagi dekat dengan PPP karena GMII menganggap kepemimpinan PPP di bawah Suryadarma Ali tak menguntungkan organisasinya. Kedekatan keduanya dimulai dari kedekatan elit GMII dan elit PPP dalam organisasi lain, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi). Menjadi wajar apabila GMII memutuskan tidak lagi dekat dengan PPP karena PPP tidak dipimpin oleh personil Parmusi. GMII terlibat dalam keruwetan faksionalisasi PPP. GMII mengadakan konsolidasi internal organisasinya dan memutuskan untuk menyatakan diri tidak lagi dekat dengan PPP.

Penelitian kedua, yang dilakukan Daryanto (2013) yang berjudul “*Strategi KAMMI dalam Penguatan Gerakan Mahasiswa Pasca Reformasi*”. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tentang strategi KAMMI dalam penguatan gerakan mahasiswa pasca reformasi, sekaligus menelusuri latar belakang strategi tersebut dipilih dan implikasinya. Hasil dari penelitian ini

diketahui bahwa dalam menebar dan menguatkan ideologi, KAMMI sangat mengandalkan sistem kaderisasi berupa rekrutmen anggota, Dauroh Marhalah, dan diskusi formal informal. Dalam membentuk jaringan, KAMMI utamanya membangun jaringan pada kelompok yang berasal dari gerakan tarbiyah, dan berikutnya membangun relasi elemen eksternal dengan membentuk aliansi dan berbagi gagasan. Sementara aksi-aksi kolektif KAMMI dilakukan dengan membingkai setiap aksinya dengan empat Paradigma KAMMI. Sementara implikasi atas strategi gerakan tersebut menghasilkan stok pemimpin masa depan, di samping juga memunculkan stigma bahwa KAMMI *underbow* PKS.

Penelitian ketiga dilakukan Pamungkas (2016) yang berjudul “Gerakan Mahasiswa di UNY dan UIN SUKA: Sebuah Perbandingan Atas Hasil”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memperbandingkan gerakan mahasiswa UNY dan gerakan mahasiswa UIN SUKA dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan gerakan dalam merubah kebijakan kampus terkait permasalahan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa UNY relatif gagal dalam merubah kebijakan kampus dibandingkan dengan gerakan mahasiswa UIN SUKA yang berhasil merubah kebijakan. Hal yang paling menentukan adalah budaya politik disuatu masyarakat mendukung sebuah gerakan atau malah menekan sebuah gerakan. Konsistensi dalam upayanya menekan terus menerus terhadap pemangku kebijakan merupakan hal pembeda antara gerakan mahasiswa UNY dan UIN SUKA. Gerakan mahasiswa UNY mempunyai banyak kendala terkait

framing isu, mobilisasi sumber daya, dan konsistensi. Selama tiga tahun ini gerakan mahasiswa UNY relatif gagal dalam merubah kebijakan kampus, karena kurang mempunyai ketiga hal tersebut. Sementara gerakan mahasiswa UIN SUKA sukses dalam melakukan *framing* isu, mobilisasi sumber daya, dan selalu konsisten untuk mengawal kebijakan. Hal yang paling menentukan keberhasilan gerakan mahasiswa UIN SUKA dalam merubah kebijakan kampus terletak pada militansi dan aksi radikal yang dilakukan gerakan mahasiswa yang mampu memenangkan pertarungan dengan pihak.

Penelitian keempat dilakukan Akbar (2016) dengan judul “*Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)*”. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana gerakan sosial dan demokrasi di Indonesia, khususnya terkait dengan gerakan mahasiswa terhadap dinamika perubahan sosial. Diperoleh hasil, gerakan mahasiswa sebagai gerakan sosial merupakan faktor paling penting dalam mewujudkan perubahan sosial. Sebagai agen perubahan, idealisme mahasiswa menjadi nilai sejauhmana perubahan sosial tersebut berjalan dengan semestinya atau penuh dengan kepentingan. Gerakan mahasiswa ini pula menjadi penanda penting keberlangsungan demokrasi tetap berjalan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Taufik (2014) yang berjudul “*Resistensi Gerakan Mahasiswa Terhadap Kapitalisasi Pendidikan (Studi Organisasi Eksternal Kampus di Unesa)*”. Hasil penelitian ini terdapat beberapa organisasi ekstra kampus yang melakukan resistensi yang didasarkan atas adanya kapitalisasi pendidikan. Selanjutnya adalah bentuk resistensi yang

dilakukan melalui pembentukan konsolidasi dari beberapa organisasi ekstra kampus dengan melakukan diskusi-diskusi mengenai situasi kampus hingga membentuk sebuah aliansi sebagai persatuan antar organisasi ekstra kampus yang kemudian menyikapi dengan penempelan pamflet, pembagian selebaran, dan aksi demonstrasi. Terakhir adalah adanya upaya untuk melemahkan gerakan mahasiswa dengan hegemonisasi yang dilakukan birokrasi kampus dengan cara pewacanaan mahasiswa liar, wacana Unesa yang akan menjadi *world class university*, banyaknya pembangunan infrastruktur, perkuliahan kewirausahaan, sistem kurikulum yang kompetitif, hingga konflik horizontal dengan organisasi intra kampus.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat memberikan gambaran bagaimana dinamika gerakan mahasiswa yang ada saat ini. Dengan dasar review literatur tersebut, peneliti berharap dapat mengambil posisi sebagai peneliti berikutnya. Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda konteks dan masanya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan paling menonjol adalah konteks permasalahan yang akan diangkat adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan presiden Joko Widodo, bagaimana strategi gerakan serta kontribusi gerakan mahasiswa tersebut. Dengan posisi yang berbeda ini, peneliti berharap hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian yang akan datang, khususnya tentang gerakan mahasiswa.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Gerakan Sosial

1.6.1.1. Gerakan Mahasiswa sebagai Gerakan Sosial

Banyak pakar teoritis sosial memberikan definisi mengenai gerakan sosial (*social movement*) karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Salah satunya definisi gerakan sosial dari Anthony Giddens (dalam Putra, dkk., 2006:3) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Jadi dapat ditafsirkan mengenai definisi konsep gerakan sosial dari Giddens yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok atau dengan kata lain gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama.

Tarrow (dalam Putra, dkk., 2006: 3) menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Perspektif Tarrow lebih memfokuskan pada aspek sosial politik dimana dalam pernyataannya gerakan sosial didefinisikan sebagai sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk aliansi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau semacamnya bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan ataupun elit politik

jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Gerakan sosial bisa beroperasi dalam batas-batas legalitas suatu masyarakat, namun bisa juga bergerak secara ilegal atau sebagai kelompok bawah tanah (*undergrounds groups*).

Dalam definisi gerakan sosial, menurut Syarbaini (2013: 156) ada beberapa komponen-komponen yang harus ada, yaitu:

1. Kolektivitas orang yang bertindak bersama.
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama.
3. Kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal.
4. Tindakannya memunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional.

Gerakan sosial tidak muncul begitu saja, ada beberapa tahapan yang menlatar belakanginya timbulnya sebuah gerakan sosial. Pertama, hubungan antara proses framing yang diartikan sebagai upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolektif. Adanya pemikiran tentang perubahan politik objektif yang memfasilitasi kemunculan gerakan sosial. Perubahan politik tertentu mendorong mobilisasi tidak hanya melalui pengaruh objektif yang diakibatkan oleh perubahan relasi

kekuasaan tetapi juga oleh setting dalam pergerakan proses framing yang selanjutnya menggerogoti legitimasi sistem (Syarbaini (2013: 159).

Kedua, suatu gerakan sosial juga bisa muncul kerana kaitan resiprokal antara proses framing dan mobilisasi. Proses framing secara jelas mendorong mobilisasi ketika orang-orang berupaya mengorganisasi dan bertindak pada basis kesadaran yang berkembang tentang ketidakabsahan dan kerentanan sistem. Pada saat yang sama, potensi bagi proses framing yang kritis dikondisikan oleh akses orang-orang kepada berbagai struktur mobilisasi. Dan hal ini akan lebih mungkin terjadi dalam kondisi organisasi yang kuat daripada kondisi organisasi yang lemah. Dengan kata lain, proses framing tidak akan terjadi dalam kondisi ketiadaan organisasi, karena ketiadaan struktur mobilisasi hampir pasti akan mencegah penyebaran framing ke jumlah minimal orang yang diperlukan untuk basis tindakan kolektif (Syarbaini, 2013: 160)

Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melakukan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok. Gerakan Mahasiswa menurut Matulesy (2005: 2) menyatakan gerakan mahasiswa adalah perilaku kolektif dari sekumpulan individu dalam waktu yang relatif lama, terorganisir dan mempunyai tujuan untuk mengadakan perubahan struktur sosial yang dianggap tidak memenuhi harapan, serta memunculkan kehidupan yang lebih baik.

Perkembangan gerakan mahasiswa Indonesia tidak pernah terlepas dari perlawanan Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda serta fasis Jepang. Salah satu bentuk gerakan sosial (*social movement*) adalah gerakan mahasiswa (*student movement*), di samping berbagai gerakan lain yang dilakukan oleh buruh, petani, pecinta lingkungan dan sebagainya. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat berpendidikan yang sering juga disebut sebagai kaum intelektual dan sehari-harinya bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kampus, atau memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Kegelisahan-kegelisahan mahasiswa itu akhirnya teraktualisasikan dalam bentuk aksi-aksi protes dengan harapan dapat mendorong perubahan secara reformatif terhadap sistem politik yang sedang berjalan.

Gerakan Mahasiswa sebagai bentuk gerakan sosial selalu muncul dengan bentuk organisasi tertentu, baik dari tingkatan yang paling sederhana sampai dengan yang kompleks. Aktifitas mereka pun didasari oleh berbagai alasan dan strategi tertentu yang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selain itu gerakan mahasiswa relatif memiliki usia yang lama untuk beraktifitas, paling tidak semasa mereka kuliah dalam waktu 3 sampai dengan 4 tahun. Namun demikian gerakan mahasiswa tidak pernah padam sama sekali, selalu beraktifitas dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi sosial suatu negara (Matullesy, 2005: 12-13).

Adapun ciri khas dari gerakan tersebut, menurut Jayanto dalam Siregar (2008) menjelaskan ciri gerakan mahasiswa, yaitu :

1. Bersifat spontanitas. Partisipasi mahasiswa dalam gerakan merupakan respon spontan atas situasi yang tidak sehat, bukan atas ideologi tertentu, melainkan atas nilai-nilai ideal. Namun hal ini bukan berarti tidak ada pendidikan publik di kalangan mahasiswa.
2. Bercorak nonstruktural. Gerakan mahasiswa tak terkendali oleh suatu organisasi tunggal, termasuk kepemimpinan komando, melainkan bercorak organisasi cair, dengan otonomi masing-masing berbasis kampus sangat besar. Agenda aksi dibicarakan secara terbuka dan diputuskan serta diorganisasikan secara kolektif.
3. Bukan agenda politik di luar kampus. Gerakan mahasiswa bersifat independen dari kelompok kepentingan tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan ada langkah bersama. Ini bisa terjadi lantaran sifat gerakan mahasiswa itu sendiri yang merupakan reartikulator kepentingan rakyat atau gerakan moral.
4. Memiliki jaringan luas. Mengingat otonomi masing-masing kampus begitu tinggi, pola gerakan mahasiswa terlatak pada jaringan yang dibinanya. Bentuk jaringan menjadi salah satu ciri dari pengorganisasian gerakan mahasiswa. Jaringan yang terbentuk biasanya luwes sehingga memudahkan untuk bermanuver serta tidak mudah untuk dikooptasi oleh kelompok kepentingan yang bertentangan dengan gerakan moral, termasuk pemerintah.

1.6.1.2. Strategi Gerakan Mahasiswa

Menurut Peter Ducker, definisi strategi secara umum adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*) (Ruslan, 2002 : 139). Berdasarkan dari definisi tersebut, Ruslan mengembangkan secara lebih rinci, yaitu bahwa strategi adalah memutuskan apa yang harus dikerjakan dalam langkah-langkah tertentu dalam proses manajemen dimulai dengan penentuan suatu rencana (*plan*), dimana rencana tersebut merupakan produk dari suatu perencanaan (*planning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen (Ruslan, 2002 : 120).

Siagian (2004) menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pengertian strategi lainnya seperti yang diutarakan Craig & Grant (1996) adalah strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Menurut Stephanie K. Marrus (dalam Umar, 2005:31), pengertian strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Quinn (1990) strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk unique berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan.

Dalam konteks gerakan mahasiswa, strategi juga diterapkan untuk mencapai tujuan dari gerakan mahasiswa tersebut. Gerakan mahasiswa ada yang terjadi secara spontanitas dan ada yang terjadi secara permanen atau terus menerus. Maka strategi dalam konteks gerakan mahasiswa Matulesy (2005: 42-47) memiliki ciri antara lain:

1. Gerakan mahasiswa dibawah oleh organisasi, baik kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Gerakan mahasiswa memiliki tujuan yang berbeda, pada gerakan mahasiswa yang permanen tujuannya mempengaruhi kebijakan, sedangkan yang bersifat temporer bertujuan menekan kebijakan pemerintah dan melakukan perubahan politik.
3. Gerakan mahasiswa dilakukan dengan penuh kesadaran
4. Gerakan mahasiswa memiliki ideologi
5. Gerakan mahasiswa tidak membentuk lembaga resmi seperti parpol, namun lebih pada aksi kolektif untuk mewujudkan gerakan.
6. Dalam menggelar aksi kolektif gerakan mahasiswa menampilkan isu-isu strategis dalam sarana massa memobilisasi dan mengefektifkan aksi

1.6.1.3. Konstruksi Sosial dalam Gerakan Mahasiswa

Konstruksi sosial menurut Waters adalah *human beings construct social reality in which subjective processes can become objectified*. Konstruksi sosial adalah konsep yang menggambarkan bagaimana realitas sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat. Konstruksi sosial menggambarkan proses di mana melalui tindakan dan interaksi, manusia menciptakan secara terus-menerus suatu kenyataan yang dimiliki bersama yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti secara subjektif (Ian, 1997: 53).

Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada "*realitas adalah konstruksi sosial*" dari Berger dan Luckmann. Selanjutnya yang dikatakan bahwa konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal. Hal ini tidak mengansumsikan keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu (Ngangi: 2011: 1).

Dalam kaitannya dengan gerakan mahasiswa, pada dasarnya gerakan mahasiswa merupakan upaya untuk melakukan konstruksi sosial akan isu-isu yang diusungnya. Gerakan mahasiswa ingin membentuk atau merubah konstruksi sosial yang ada dipeserta aksi, masyarakat, media dan

pemerintahan yang dikritiknya. Dengan harapan logika berpikir dan cara pandang mengikutinya, sehingga dimungkinkan dapat merubah kebijakan.

Pada konteks gerakan mahasiswa UMY yang melakukan gerakan dengan mengkritisi kebijakan presiden Joko Widodo. Konstruksi sosial akan kebijakan yang dijalankan Joko Widodo dianggap salah dan harus dikonstruksi ulang untuk mendapatkan konstruksi sosial yang baru yang mampu melawan konstruksi yang lalu. Dengan diterimanya konstruksi tersebut, maka gerakan akan mendapat dukungan dari peserta aksi, masyarakat, media dan bahkan dapat mempengaruhi kebijakan yang ada.

1.6.2. Kebijakan Pemerintahan

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu : penjelasan mengenai tujuan yang ingin

dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penulisan dan evaluasi.

Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Anderson dalam Widodo, 2001:190).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu dalam hal ini pemerintah, yaitu berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dahlan Thaib dan Jazim Hamidi dalam bukunya Teori dan Hukum Konstitusi, mengemukakan pengertian kebijakan adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa dalam ketatanegaraan (Thaib dan Hamidi, 2001:77). Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah (melalui kebijakan pemerintah). Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaraanya.

Dalam literatur administrasi, Subarsono (2006:87) menyatakan kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan presiden bersama-sama dengan DPR.

Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang dan Peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perpu) dibuat oleh presiden dalam hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, ketetapan MPR maupun undang undang guna mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijaksanaan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijaksanaan umum tersebut merupakan tertulis berupa peraturan

perundang-undangan seperti halnya keputusan presiden (Kepres), peraturan pemerintah (PP) maupun Instruksi Presiden (Inpres).

Sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu presiden yaitu para menteri atau pejabat lain setingkat dengan menteri dan pimpinan sesuai dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya serta perundang-undangan berupa peraturan, keputusan atau instruksi pejabat tersebut (pejabat/menteri). Salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat menteri, gubernur, walikota/bupati berupa surat keputusan yang mengatur tata laksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Pengertian strategi merupakan serangkaian sasaran organisasi yang kemudian mempengaruhi penentuan tindakan komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau alat dengan mana tujuan akan dicapai.

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya (Sarundajang, 2002:5)

Pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan (Ridwan HR, 2002:2). Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara (Manan, 2001:101).

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan

masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13). Osborn dan Gaebler (dalam Rosyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Ndraha (2000 : 70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan *civil*.

Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pendapat dikemukakan oleh Rasyid (2000 : 13) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan meliputi:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta

kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Namun, secara ringkas Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

1.6.3. Kebijakan Jokowi dan Isu-isu kebijakan yang dikritik

Kebijakan presiden Joko Widodo dalam menyelenggarakan pemerintahan nasional tentu tidak lepas dari visi misi dan program pada saat kampanye sebelum menjadi presiden. Untuk itu, untuk lima tahun kedepan, pemerintahan kami akan dipandu oleh VISI sebagai berikut: Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi tersebut diturunkan pada tataran program, yaitu 9 program atau disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan yang meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa,

nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Ketika pemerintahan Jokowi berjalan maka semangat Nawa Cita tersebut masuk dalam RPJMN. Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah selama 5 tahun ke depan. Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut: (disarikan dari Agenda Pembangunan Nasional –RPJMN 2015-2019).

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinnekaan dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayah dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
4. Kondisi Perlu yang memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tatakelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

Dengan demikian semua agenda pembangunan nasional yang merupakan penjabaran Nawa Cita telah tertuang dalam prioritas pembangunan yang terkandung baik dalam ketiga dimensi

pembangunan maupun pembangunan kondisi perlu yang akan dilaksanakan tahun 2015 - 2019.

Setiap kebijakan pemerintah Joko Widodo yang sudah berjalan 2 tahun lebih tidak semuanya diterima oleh semua kalangan, termasuk kalangan mahasiswa yang selalu menyuarakan suara rakyat. Isu-isu kebijakan Joko Widodo banyak yang berbuah kritikan dari demo-demo mahasiswa yang ada diseluruh Indonesia. Kritik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.

Curtis dkk., (2005: 284) mengatakan kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Selanjutnya dalam konteks kritik terhadap pemerintah, pengertian di atas dapat diturunkan bahwa kritik harus ada unsur:

1. Evaluasi kebijakan yang dianggap salah atau kurang sesuai berupa latar belakang kesalahan, alasan dan argumentasi;
2. Upaya menyampaikannya kritik melalui berbagai kegiatan (seminar, diskusi, demonstrasi);
3. Upaya memberikan alternatif solusi untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap salah.

Beberapa isu-isu yang menjadi kritik gerakan mahasiswa terhadap pemerintahan Joko Widodo dapat dikelompokkan menjadi 4 isu kebijakan sebagai berikut:

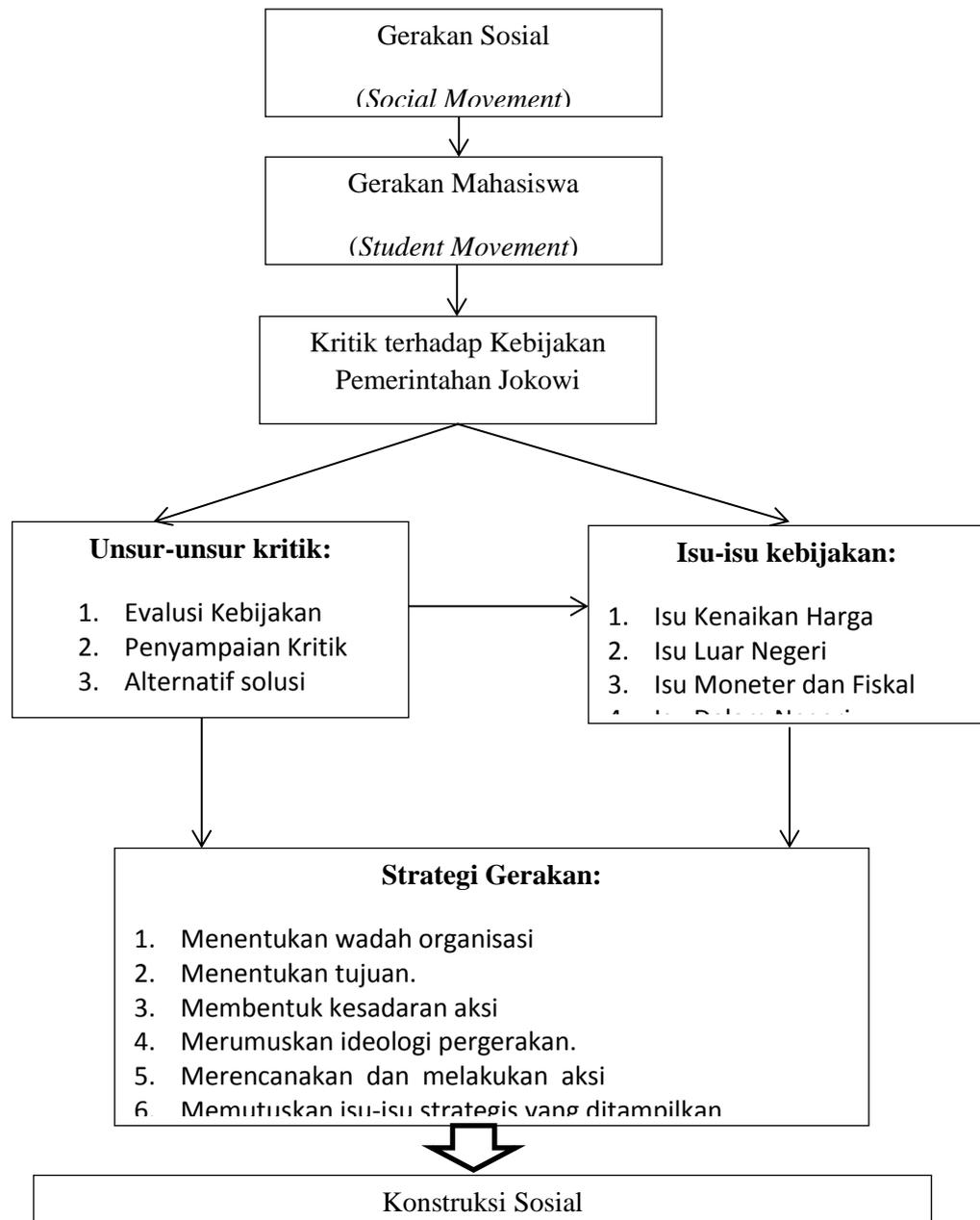
1. Isu Kenaikan harga, meliputi kenaikan BBM, harga-harga bahan makanan pokok, kenaikan tarif listrik, kenaikan biaya kepengurusan kendaraan bermotor, kenaikan iuran BPJS dan lain sebagainya.
2. Isu Kebijakan luar negeri, meliputi: kebijakan investasi asing yang longgar, masalah impor bahan makanan, masalah Freeport, masalah Palestina, masalah hubungan dengan Cina, dan lain sebagainya.
3. Isu kebijakan fiskal dan moneter, meliputi: tax amnesty, kurs tukar dollar terhadap rupiah masih tinggi, dan lain-lain.
4. Isu dalam negeri meliputi: isu ketenagakerjaan, iklim investasi, kepegawaian, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Gerakan mahasiswa sebagai bagian dari gerakan sosial mempunyai fungsi kontrol terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Sebagai kaum intelektual dengan wawasan yang luas, mempunyai idealitas yang tinggi serta mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, maka mahasiswa merupakan kekuatan strategis untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan sebuah rezim. Setelah gerakan mahasiswa tahun 1988 yang berhasil menggulingkan rezim Soeharto yang memerintah lebih dari 32 tahun, gerakan mahasiswa saat ini lebih kepada gerakan mengontrol jalannya pemerintahan agar kebijakan-kebijakan sesuai dengan cita-cita negara, tidak menyengsarakan rakyat serta menuju kesejahteraan rakyat.

Kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia di wadah oleh organisasi BEM, termasuk yang ada di UMY. Kritik-kritik tersebut disampaikan dengan berbagai alasan hasil evaluasi, disampaikan dalam forum diskusi dan dalam aksi-aksi demonstrasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi dalam masa awal pemerintahannya terfokus pada beberapa isu krusial yang dapat dikelompokkan menjadi 4 isu kebijakan sebagai berikut: a) Isu Kenaikan harga, meliputi kenaikan BBM, harga-harga bahan makanan pokok, kenaikan tarif listrik, kenaikan biaya kepengurusan kendaraan bermotor, kenaikan iuran BPJS dan lain sebagainya; b) Isu Kebijakan luar negeri, meliputi: kebijakan investasi asing yang longgar, masalah impor bahan makanan, masalah Freeport, masalah Palestina, masalah hubungan dengan Cina, dan lain sebagainya; c) Isu kebijakan fiskal dan moneter, meliputi: tax amnesty, kurs tukar dollar terhadap rupiah masih tinggi, dan lain-lain; d) Isu dalam negeri meliputi: isu ketenagakerjaan, iklim investasi, kepegawaian, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Kritik kebijakan pemerintahan presiden Joko Widodo yang dilakukan mahasiswa memerlukan strategi gerakan untuk memuluskan tujuan dari aksi pergerakan tersebut. Strategi gerakan mahasiswa merupakan pola atau rencana yang diputuskan dan dikerjakan dengan langkah-langkah yang mengintegrasikan tujuan bersama, perencanaan dan pelaksanaan aksi utama secara sistematis untuk tujuan gerakan mahasiswa. Strategi tersebut akan meningkatkan efektifitas gerakan mahasiswa, mengarahkan serta membuat

gerakan menjadi terencana dan terfokus untuk mencapai tujuan, baik tujuan aksi maupun tujuan organisasinya. Selanjutnya gerakan mahasiswa ini akan memberikan kontribusi terhadap konstruksi sosial yang ada. Secara sederhana kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 1. Kerangka Pikir Penelitian

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual penelitian ini meliputi:

1. Pergerakan Mahasiswa adalah perilaku kolektif dari sekumpulan mahasiswa, terorganisir dan mempunyai tujuan untuk mengadakan perubahan struktur sosial yang dianggap tidak memenuhi harapan, serta memunculkan kehidupan yang lebih baik
2. Kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo adalah suatu kecaman atau tanggapan terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang dirasa tidak memenuhi harapan atau mengakibatkan penderitaan rakyat.
3. Strategi gerakan mahasiswa adalah pola atau rencana yang diputuskan dan dikerjakan dengan langkah-langkah yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama secara sistematis untuk tujuan gerakan mahasiswa.
4. Konstruksi sosial dalam gerakan mahasiswa adalah konsep yang menggambarkan bagaimana realitas sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh gerakan mahasiswa.

1.8. Definisi Operasional

Definisi Operasional penelitian ini adalah

1. Kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo merupakan penyampaian penilaian, keberatan dan tuntutan atas suatu kebijakan yang tidak sesuai memenuhi harapan atau mengakibatkan penderitaan rakyat. Kritik terhadap

pemerintahan Jokowi. Selanjutnya dalam konteks kritik terhadap pemerintah, kritik harus memuat unsur:

- a. Evaluasi kebijakan yang dianggap salah atau kurang sesuai berupa latar belakang kesalahan, alasan dan argumentasi;
- b. Upaya menyampaikannya kritik melalui berbagai kegiatan (seminar, diskusi, demonstrasi);
- c. Upaya memberikan alternatif solusi untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap salah.

2. Strategi gerakan mahasiswa meliputi:

- a. Menentukan wadah organisasi yang digunakan.
- b. Menentukan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan, menekan kebijakan pemerintah atau melakukan perubahan politik.
- c. Membentuk kesadaran peserta aksi
- d. Merumuskan ideologi pergerakan.
- e. Merencanakan dan melakukan aksi kolektif untuk mewujudkan gerakan.
- f. Memutuskan isu-isu strategis yang ditampilkan

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Konsep penelitian kualitatif sebenarnya menunjuk dan menekankan pada proses, dan berarti tidak diteliti secara ketat atau terukur (jika memang dapat diukur),

dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, hubungan yang intim antara peneliti dengan yang diteliti dan kendala situasional yang membentuk penyelidikan (Salim, 2001:11). Tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu. Mencoba menerobos dan mendalami gejalanya dengan menginterpretasikan masalahnya/menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. Secara spesifik penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, dimana peneliti berusaha mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi secara utuh dan sistematis.

Menurut Bogdan dan Taylor bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar atau individu tersebut secara holistik (utuh). Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2010: 4).

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkangambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat

kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian (Hadari, 2001:63).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan didukung data-data yang didapat secara lengkap. Dalam pendeskripsian suatu permasalahan dan subjek penelitian, peneliti akan melakukan pendalaman dengan analisis data yang akan melihat suatu hubungan atau proses, menciptakan kategorisasi, serta memberikan pemaknaan sesuai gambaran data yang didapat. Pendeskripsian suatu tema penelitian dilakukan secara lengkap, komprehensif dan sesuai kenyataan yang mampu ditangkap peneliti.

1.9.2. Objek Penelitian

1.9.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kampus UMY yang berlokasi di Kampus Terpadu UMY Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183.

1.9.2.2. Responden

Unit analisis dari penelitian ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BEM KM UMY). Unit analisis berupa organisasi bukan perorangan, namun yang akan diberikan kuesioner adalah orang-orang yang mempunyai peran penting dalam organisasi ini, misalkan pimpinan, pelaku, atau bagian tertentu yang terkait dengan tema penelitian.

Teknik pengambilan *sampling* atau narasumber dengan menggunakan sistem sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana responden yang diberikan kuesioner telah ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan diantaranya adalah untuk yang BEM terutama mereka yang pernah ikut demonstrasi karena beberapa dari anggota BEM ini akan diwawancara mendalam, sedangkan untuk yang non-BEM tidak ada kriteria khusus.

Dengan demikian responden diambil dari masing masing fakultas, kemudian dirinci menjadi program studi, lalu dipilih baik anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (yang pernah mengikuti demonstrasi) maupun Non BEM (pertimbangan jumlah jenis kelamin), masing masing 10 (sepuluh) orang setiap fakultas, sehingga diperoleh responden sebagai berikut :

Tabel 1.1. Responden

No	Fakultas (tiap Prodi)	Disebar	Tidak Kembali	Kembali
1	Fakultas ISIPOL	10	0	10
2	Fakultas Ekonomi	10	1	9
3	Fakultas Hukum	10	0	10
4	Fakultas Kedokteran	10	7	3
5	Fakultas Teknik	10	2	8
6	Fakultas Agama Islam	10	0	10
	Jumlah	60	10	50

1.9.3. Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner dan wawancara langsung dan merupakan informasi utama dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari organisasi terkait, kantor statistik, dan jurnal ilmiah yang dapat mendukung data pada penelitian ini. Serta data-data media masa yang terpublikasi secara luas.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan jawaban bertingkat untuk dijawab oleh responden, yaitu sangat setuju, setuju, biasa saja, kurang setuju dan tidak setuju sama sekali. Tetapi peneliti tidak memberikan bobot melainkan masing masing tingkat dikalkulasi berapa jumlah responden yang memilih dan kemudian diprosentasikan

2. Wawancara

Wawancara adalah sebagai usaha lanjutan peneliti untuk mengetahui mengapa responden memilih tingkat jawaban tertentu, yaitu dengan mempertanyakan alasan-alasan yang dipakai. Untuk yang peserta dari BEM dilakukan wawancara mendalam dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan (selain kuesioner). Anggota BEM yang diwawancara ada 7 orang yang semuanya terlibat dalam aksi-aksi yang dilakukan BEM UMY.

3. Pengamatan (Observasi)

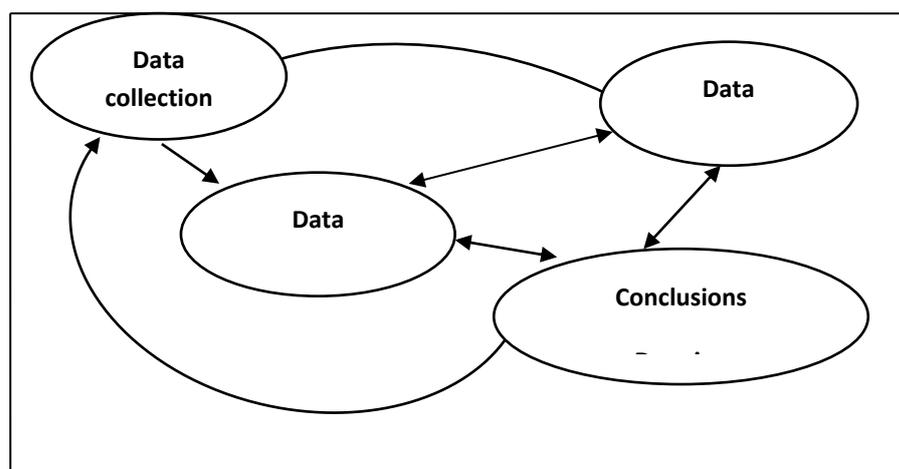
Observasi adalah pengamatan langsung peneliti yaitu peneliti mencatat hari, bulan dan tanggal kejadian, serta peristiwa dan tempat kejadian penelitian.

4. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti arsip-arsip diskusi, seminar atau foto-foto demonstrasi yang ada. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang ada. Tujuan peneliti menggunakan studi dokumentasi, yaitu untuk memperkaya data yang diperlukan, serta untuk menguji reliabilitas dan validitas data yang didapatkan dilapangan.

1.9.5. Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono (2010:87) Analisis data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya mengakibatkan variasi data yang tinggi. Data yang diperoleh umumnya data kualitatif. Bogdan (dalam Sugiyono, 2010:88) Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.



Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 92)

Gambar 1.1. Analisis Data Model Interaktif

Dari gambar tersebut dijelaskan sebagai berikut dimulai dari pengumpulan data setelah itu reduksi data kemudian data disajikan atau dari pengumpulan data langsung ke penyajian data selanjutnya reduksi data. Setelah itu dari reduksi data ditarik kesimpulan-kesimpulan atau dari penarikan kesimpulan diperoleh dari penyajian data. Akhirnya apabila dalam penarikan kesimpulan mengalami kesalahan dikembalikan ke pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan tahapan interaktif seperti berikut(Moleong, 2010:103):

1. Pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian, karena dalam tahapan ini peneliti dituntut untuk dapat terjun langsung ke lapangan di mana penelitian dilakukan, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Akan tetapi dalam tahap pengumpulan data yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah pengambilan dan pengumpulan data harus dilakukan secara objektif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi

data-data dari hasil kuesioner, wawancara, observasi, baik mahasiswa anggota BEM KM UMY maupun Non BEM.

2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Dalam hal ini penulis di tuntut untuk dapat memperoleh data dengan cara penyederhanaan dan pemusatan penelitian yang sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian yang terlebih dahulu di tetapkan. Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan yang sesuai dengan focus penelitian maka peneliti mengolah data kasar tersebut dan menggambarkan apa yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dari BEM KM UMY. Kemudian dilanjutkan dengan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Mencari hubungan-hubungan yang ada dalam data dan mencari penjelasan-penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Proses ini bukan proses sekali jadi, namun akan terus berulang selama proses penelitian kualitatif berlangsung. Proses ini bermaksud menajamkan dan mengarahkan data sehingga memudahkan dalam penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Penyajian data

Penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahapan ini peneliti diharuskan untuk dapat memberikan gambaran tentang hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan fokus dan tujuan penelitian dari lapangan, dengan adanya data yang di sajikan oleh peneliti maka diharapkan dari data tersebut dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan dari kesimpulan tersebut peneliti dapat merumuskan tindakan-tindakan selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Proses ini berupa penyajian data-data hasil penelitian yang telah melalui reduksi data. Dengan mencermati penyajian data ini peneliti lebih mudah memahami apa saja yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan data tersebut. Dalam penyajian data juga dilakukan pemaknaan terhadap data serta interpretasi sesuai kenyataan yang terjadi di dalam pergerakan mahasiswa UMY yang direpresentasikan BEM UMY.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari lapangan dan pemahaman peneliti mengenai suatu peristiwa dari lapangan. Dari pemahaman dan data tersebut maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk cerita yang terstruktur dan sistematis. Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari analisis data. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan akan mengacu pada hasil penelitian yang ada yang dikaitkan dengan teori yang dipakai dalam

penelitian ini. Kesimpulan ini merupakan hasil penelitian yang nantinya menjadi bagian penting dari intisari atau abstrak penelitian.